

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PROVINSI
RIAU OLEH MUALLAF DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG ZAKAT
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



DISUSUN OLEH :

SOFROWI ROKAN

NIM: 10321022457

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PROVINSI RIAU OLEH MUALLAF DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN HUKUM ISLAM"**.

Penelitian ini penulis lakukan pada BAZ Provinsi Riau yang beralamat di Jln. Syekh Burhanuddin Komplek Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ, bagaimana penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf, dan bagaimana tinjauan menurut Undang-Undang zakat dan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf.
3. Untuk mengetahui tinjauan menurut Undang-Undang zakat dan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah muallaf dan pengurus BAZ Provinsi Riau. Sedangkan objeknya adalah penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BAZ Provinsi Riau yang berjumlah 5 orang dan para muallaf yang menerima dana zakat dari BAZ Provinsi Riau yang berjumlah 30 orang. Sedangkan yang menjadi sampelnya diambil sebanyak 3 orang dari BAZ Provinsi Riau dan 15 orang atau 50 % dari muallaf yang menerima dana zakat. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu *interview* atau wawancara, angket, observasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ yaitu cukup selektif. Hal ini dapat diketahui dari persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZ Provinsi Riau, seperti muallaf yang telah memeluk agama Islam paling lama 2 tahun, muallaf harus memiliki surat keterangan masuk Islam dari pihak yang berwenang, seperti surat keterangan dari kelurahan setempat serta harus memiliki Kartu Keluarga dan kartu identitas lainnya. Penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf yaitu untuk kebutuhan konsumtif sebanyak 8 orang atau 53,34%, membuka usaha baru sebanyak 3 orang atau 20,00%, menambah modal usaha berjumlah 2 orang atau 13,33%, dan lain-lain sebanyak 2 orang atau 13,33%. Zakat yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf pada saat ini belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan zakat oleh para muallaf yang cenderung bersifat konsumtif sehingga dana zakat tersebut cepat habis dan tujuan zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI RIAU ..	13
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Riau	13
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Riau	16
C. Stuktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau	17
D. Program dan Kegiatan Badan Amil Zakat Provinsi Riau	18
BAB III ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA MENURUT UU ZAKAT DAN HUKUM ISLAM	24
A. Zakat dan Pengelolaannya Menurut Undang-Undang Zakat	24

1. Pengelolaan	24
2. Penggunaannya	25
B. Zakat Dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Zakat	25
2. Hukum Zakat	26
3. Harta Yang Wajib Dizakatkan	28
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	36
5. Manfaat dan Hikmah Zakat	47
C. Efektivitas Pengelolaan Zakat	49
BAB IV EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PRODUKTIF	
PROVINSI RIAU OLEH MUALLAF DITINJAU MENURUT	
UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN HUKUM ISLAM	52
A. Pertimbangan BAZ Provinsi Riau Menetapkan Kriteria Muallaf	
Yang Mendapat Dana BAZ	52
B. Penggunaan Dana BAZ Produktif Provinsi Riau Oleh Para	
Muallaf	59
C. Tinjauan Menurut Undang-Undang Zakat Dan Hukum Islam	
Terhadap Penggunaan Dana BAZ Produktif	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.¹ Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Tuhan, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Dalam al-Qur'an berulang kali diterangkan agar kaum Muslim

¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-1, h. 1.

²Tim Redaksi Wikrama Waskitha, *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Wikrama Waskitha, 1999), h. 160.

membayar zakat, di samping menegakkan shalat. Tidak kurang dari 30 kali dan yang bergandengan dengan kewajiban shalat 28 kali.³

Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, *shadaqah* di Provinsi Riau didirikan untuk pertama kali pada tanggal 12 Desember 1987. Yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 532/XII/1987 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, Infaq, *Shadaqah* dan *Baitul Maal* dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 533/XII/1987 tentang penunjukan/pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, *Shadaqah* dan *Baitul Maal* Provinsi Daerah Tingkat I Riau, dengan Ketua Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, yang waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Mukhtar Samad.

BAZ Provinsi Riau telah memberikan dana zakat kepada para muallaf. Pada tahun 2006 muallaf yang menerima bantuan dana zakat yaitu berjumlah 13 orang, dengan nominal sekitar Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah muallaf yang menerima bantuan dana zakat mengalami peningkatan yaitu 17 orang yakni yang belum menerima zakat pada tahun lalu, dengan nominal sekitar Rp2.000.000-Rp 2.500.000.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-2, h. 134.

Zakat merupakan dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan untuk memperdekat jarak si miskin dan lemah dengan si kaya dan si kuat, guna mewujudkan keadilan dalam kemakmuran, demikian juga kemakmuran dalam keadilan.

Ada dua pendekatan yang efisien dan efektif tentang zakat, yaitu:

1. Pendekatan *Parsial*, dalam hal ini pertolongan terhadap si miskin dan lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Pendekatan Struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin dan lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan bahkan diharapkan nantinya mereka menjadi *Muzakki* (pemberi zakat).⁴

Dengan pendekatan bentuk kedua ini diharapkan zakat sebagai konsep sosial untuk meningkatkan kualitas hidup segala golongan masyarakat (mustahik atau penerima zakat), sehingga dapat mengurangi kepincangan sosial. Pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mekanisme fiskal zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian ini. Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikannya apabila telah sampai nisab dan haulnya. *Nisab* adalah harta itu mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya.⁵ Sedangkan *haul* adalah harta yang jumlahnya mencapai *nisab* itu telah dimiliki selama satu tahun penuh.

⁴*Ibid.*, h. 137.

⁵Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-3, h. 149.

Dalam kehidupan seorang Muslim tidak saja dikenal dan juga dilaksanakan apa yang disebut dengan perintah shalat, puasa, zakat maupun ibadah haji. Namun dari empat jenis ibadah ritual Umat Islam itu, ada satu ibadah yang punya dimensi sangat luas, yaitu zakat.

Zakat tidak saja berdimensi ibadah dalam konteks menegakkan syariat Allah SWT, tetapi zakat juga berdimensi sosial. Pilar-pilar dalam membangun kekuatan umat dengan tidak membedakan derajat ekonomi adalah perintah melaksanakan zakat. Perintah ini sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat bermanfaat dan tepat sasaran serta diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dari pendistribusian zakat tersebut.

Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak. Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit *bakhil* (kikir) dan *tama'*. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶
(QS. at-Taubah: 103).

Dari penjelasan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Amil zakat harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya. Bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan oleh para Amil pada masa sekarang ini. Di dalam surat yang lainnya Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya".⁷ (QS. ar-Ruum: 39).

Berdasarkan keterangan ayat al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa dengan mengeluarkan zakat maka Allah Swt akan membalas orang yang mengeluarkan zakat tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Di dalam Surat al-Baqarah ayat 43 Allah Swt juga berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁶ Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1983), Cet. ke-8, h. 184.

⁷ *Ibid.*, h. 368.

Artinya : ”Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁸ (QS. al-Baqarah: 43).

Dari keterangan ayat al-Qur’an di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt mensejajarkan antara perintah shalat dan zakat. Jadi melaksanakan atau mendirikan shalat harus diiringi kemudian dengan menunaikan zakat.

Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-Muallafah*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum Muslimin.⁹ Sedangkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam disebut bahwa muallaf secara harfiah muallaf *qalbuh*: jamaknya *muallafah qulubuhum* yang artinya orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Maksudnya orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam.¹⁰

BAZ Provinsi Riau memberikan bantuan dana zakat kepada para muallaf pada tahun 2006-2007 berjumlah 30 orang. Adapun kriteria muallaf yang meneriza zakat yaitu mereka yang telah menjadi muallaf maksimal selama 2 tahun. Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi yaitu adanya surat keterangan masuk Islam dari pihak yang terkait.

⁸ *Ibid.*, h. 8.

⁹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1991), Cet. ke-1, h. 138.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1999), Jilid 4, h. 1187.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan sekretaris dan staff BAZ Provinsi Riau. Mereka menyatakan bahwa di dalam perjanjian para muallaf akan mempergunakan bantuan dana zakat untuk kegiatan yang produktif seperti modal bengkel sepeda motor, jualan barang keperluan harian, jualan buah-buahan, berdagang, dan lain-lainnya. Ada muallaf yang memang betul-betul menggunakan dana BAZ Provinsi Riau sesuai dengan perjanjian pengurus BAZ seperti Ibu Halimah yang menggunakan dana zakat tersebut untuk berjualan barang harian. Terbukti pada tahun 2006 ia menerima dana zakat dan pada tahun 2007 ia datang lagi bukan untuk meminta dana zakat, tetapi untuk memberikan zakat kepada BAZ Provinsi Riau.¹¹ Tetapi kenyataannya ada sebagian muallaf yang lainnya menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang bersifat konsumtif, berfoya-foya seperti membeli TV, baju atau pakaian, sepeda untuk anaknya, dan lain sebagainya sehingga dana tersebut habis dan tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif. Setelah 3 bulan kemudian para muallaf tersebut datang lagi ke BAZ Provinsi Riau untuk meminta bantuan dana zakat.¹²

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PROVINSI RIAU OLEH MUALLAF DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN HUKUM ISLAM”**.

¹¹ Drs.H. Samsul (Sekretaris BAZ Provinsi Riau), *Wawancara*, Pekanbaru: tanggal 25-9-2008.

¹²*Ibid.*

B. Batasan Masalah

Untuk lebih menfokuskan penelitian ini maka penulis hanya meneliti mengenai penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh muallaf berdomisili di Kota Pekanbaru yang mendapat dana BAZ pada periode penyaluran tahun 2006-2007, menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana BAZ oleh muallaf.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ ?
2. Bagaimana penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf ?
3. Bagaimana tinjauan menurut Undang-Undang zakat dan hukum Islam terhadap penggunaan dana BAZ ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf.
3. Untuk mengetahui tinjauan menurut Undang-Undang zakat dan hukum Islam terhadap penggunaan dana BAZ.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN Suska Riau.
2. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
3. Untuk menambah wawasan tentang keilmuan dan cakrawala berpikir dalam kajian ilmiah dan sekaligus mengembangkan keilmuan penulis.
4. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang sama di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada BAZ Provinsi Riau yang beralamat di Jln. Syekh Burhanuddin Komplek Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah muallaf dan pengurus BAZ Provinsi Riau. Sedangkan objeknya adalah penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BAZ Provinsi Riau yang berjumlah 5 orang dan para muallaf yang menerima dana zakat dari BAZ Provinsi Riau yang berjumlah 30 orang. Sedangkan yang menjadi sampelnya diambil sebanyak 3 orang dari BAZ Provinsi Riau dan 15

orang atau 50 % dari muallaf yang menerima dana zakat. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

4. Sumber data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para muallaf penerima dana zakat dan BAZ Provinsi Riau.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* atau Wawancara

Yaitu penulis melakukan wawancara kepada pihak pengurus BAZ Provinsi Riau dan para muallaf yang mendapatkan dana zakat.

b. Angket

Yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang disebarkan oleh penulis kepada responden.

c. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan turun ke lapangan

untuk melihat dan mengamati obyek dan subyek penelitian.

- d. *Library research* yaitu penelitian dengan membaca beberapa buku yang ada di perpustakaan sebagai penunjang dalam penelitian ini.

6. Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Analisa Deduktif

Penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisa Induktif

Penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

- BAB II** Gambaran Umum Badan Amil Zakat Provinsi Riau, yaitu terdiri dari sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Program dan Kegiatan Badan Amil Zakat Provinsi Riau.
- BAB III** Tinjauan teoritis, bab ini terdiri dari zakat dan pengelolaannya menurut Undang-Undang Zakat dan Hukum Islam yang meliputi: zakat dan pengelolaannya menurut Undang-Undang Zakat, zakat dalam hukum Islam, dan efektivitas pengelolaan zakat.
- BAB IV** Pembahasan dan analisa, bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ, penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf, dan penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh para muallaf menurut Undang-Undang Zakat dan Hukum Islam.
- BAB V** Kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI RIAU

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Upaya pembentukan Badan Amil Zakat di Provinsi Riau sebenarnya sudah lama dirintis oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, yaitu sejak terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981 tentang struktur organisasi Departemen Agama di daerah. Dalam keputusan Menteri Agama tersebut antara lain ditetapkan bahwa Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, memiliki Seksi Zakat dan Baitul Maal yang bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang zakat dan baitul maal.

Tetapi intensifnya usaha tersebut baru dimulai pada pertengahan tahun 1985; yaitu sewaktu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau dijabat oleh Drs. Ishak Manany, seorang putra daerah asli Riau yang juga mantan Kepala Bidang Urusan Agama Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta.

Sebagaimana dimaklumi di DKI Jakarta telah lama dibentuk Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS) yaitu pada masa Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Ali Sadikin. BAZIS DKI Jakarta sudah berhasil mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah milyaran rupiah, sedangkan di Provinsi Riau didapatinya BAZIS belum terbentuk.

Pada bulan Mei 1985, ditunjuklah Sdr. Mahmud sebagai Kepala Seksi Zakat dan Baitul Maal pada Bidang Urusan Agama Kantor Wilayah

departemen Agama Provinsi Riau dengan tugas utama mengusahakan terbentuknya Badan Amil Zakat di Provinsi Riau.¹

Setelah konsep tersebut diteliti oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, kemudian oleh Kepala Biro Binsos dan Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala daerah Tingkat I Riau; lalu disampaikan kepada Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau yang waktu itu dijabat oleh Imam Munandar. Gubernur meminta pernyataan tertulis dari ke-25 organisasi Islam yang ikut musyawarah pembentukan Badan Amil Zakat, yang menerangkan bahwa mereka tidak keberatan dan menyetujui pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal di Provinsi Riau. Sudah barang tentu hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

Setelah pernyataan tertulis selesai dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris masing-masing organisasi dimaksud, lalu disampaikan kepada Gubernur tetapi waktu itu Gubernur Imam Munandar jatuh sakit dan tidak bisa lagi menandatangani surat. Dengan demikian pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal tertunda sampai wafatnya Imam Munandar. Kemudian ditunjukkan Drs. H. Baharuddin Jusuf yang juga putera daerah asli Riau sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Dan ketua konsep Keputusan Gubernur tentang Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal beserta pernyataan tertulis dari 25 organisasi keagamaan tersebut disampaikan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

¹Dokumentasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Tahun 2009.

Akhirnya terbitlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur) Nomor. KPTS. 532/XII/1987 tentang penunjukan/pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal (BAZISMAL) Daerah Tingkat I Riau.

Dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang Pengangkatan Pengurus BAZIS Daerah Tingkat I Riau periode tahun 1992-1997.

Setelah masa bakti kepengurusan BAZIS Daerah Tingkat I Riau tersebut berakhir, terbit pula Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau Nomor: KPTS.585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 tentang Pengangkatan Pengurus BAZIS Daerah Tingkat I Riau periode tahun 1998-2003.

Kemudian dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat; terbit pula Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat.²

Setelah masa tugas Badan Amil Zakat Provinsi Riau 2000-2003 berakhir terbitlah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau masa tugas 2003-2006 dengan Ketua Ir.H. Zulkifli Saleh.

² Dokumentasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Tahun 2009.

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Adapun yang menjadi visi Badan Amil Zakat Provinsi Riau yaitu terwujudnya Badan Amil Zakat Provinsi sebagai lembaga yang mandiri, yang dikelola dengan manajemen modern dan transparan, yang dipercaya oleh masyarakat, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama Islam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Sedangkan yang menjadi misinya yaitu sebagai berikut:

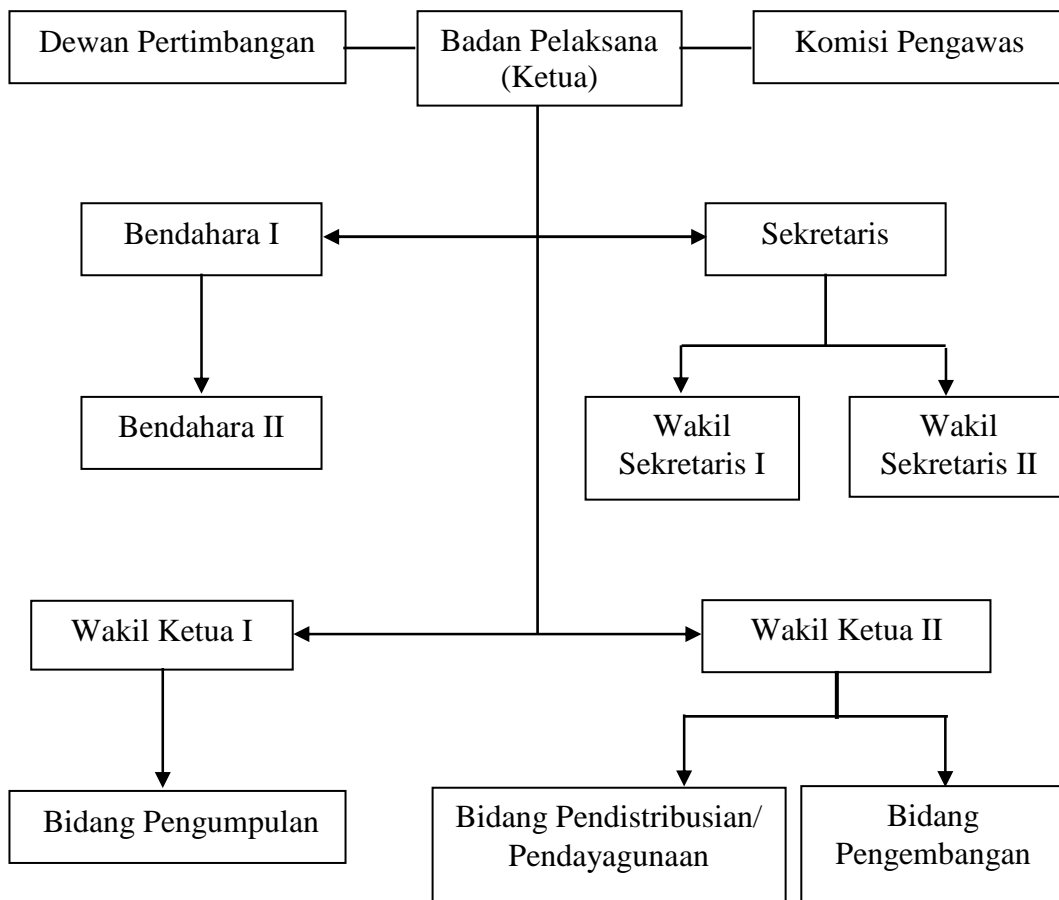
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah).
2. Meningkatkan pemberdayaan organisasi BAZ Provinsi Riau, BAZ Tingkat II, BAZ Kecamatan, dan unit pengumpul zakat di instansi/perusahaan pemerintah dan swasta.
3. Penyuluhan tentang kewajiban ZIS bagi para muzakki.
4. Memanfaatkan dana ZIS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memotivasi para mustahiq agar secara perlahan tetapi pasti berubah menjadi muzakki.³

³ Dokumentasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Tahun 2009.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau Tahun 2006-2009



Sumber: BAZ Provinsi Riau, tahun 2009

D. Program Dan Kegiatan Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Program kerja Badan Amil Zakat Provinsi Riau disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menetapkan bahwa tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁴

Undang-Undang tersebut juga mengharuskan Badan Amil Zakat dalam mengelola zakat mesti sesuai dengan manajemen yang meliputi kegiatan *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Tugas dan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh anggota pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas-tugas ketata-usahaan yang meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau menindak-lanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan.
2. Menerima dan membukukan dana zakat, infaq atau shadaqah dari para *Muzaki, Munfiq* atau *Mushadiq*; baik yang diserahkan di Kantor Badan Amil Zakat ataupun dengan cara dijemput ke tempat atau kantor yang bersangkutan ataupun disetorkan langsung melalui Rekening Badan Amil Zakat Provinsi Riau pada beberapa bank yang telah ditetapkan. Selama

⁴Badan Amil Zakat Provinsi Riau, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Provinsi Riau Tahun 2007*, h. 3.

tahun 2007 dana yang diterima oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau termasuk saldo tahun yang lalu berjumlah Rp 1.178.700.000. Sedangkan jika ditinjau dari jenis dana yang diterima adalah sebagai berikut:

a. zakat	Rp 1.119.612.640
b. infaq	Rp 46.518.420
c. jasa bank	Rp 12.568.940

3. Mengadakan *survey* ke lokasi *Mustahiq* yang akan dibantu. *Survey* dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Riau.
4. Mengadakan Rapat Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Selama tahun 2007 telah dilaksanakan 13 kali Rapat Pengurus. Beberapa kali rapat diantaranya adalah rapat dalam rangka membahas permohonan bantuan dana dari para *mustahiq*. Rapat-rapat tersebut telah menyetujui penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebanyak Rp 427.448.000.
5. Menyerahkan bantuan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada Asnaf yang telah disetujui untuk dibantu dalam Rapat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Jika dilihat dari segi Asnaf yang dibantu, dari jumlah tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Untuk Fakir-Miskin	Rp 282.923.000
b. Untuk Muallaf	Rp 39.350.000
c. Untuk Fisabilillah	Rp 102.550.000
d. Untuk Ibnu Sabil	Rp 2.625.000

Bantuan tersebut umumnya berupa uang kontan untuk modal usaha kecil seperti untuk modal usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, *home industry* dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk barang modal produktif seperti mesin jahit dan sebagainya. Demikian pula untuk *Asnaf Fisabilillah*, ada yang berupa uang kontan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, pengadaan sarana belajar dan ada pula berupa barang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti komputer dan sebagainya. Hanya sebagian kecil yang berupa bantuan konsumtif, seperti biaya *transport* dan uang makan bagi *Asnaf Ibnu Sabil* dan Fakir-Miskin yang tidak lagi bisa berusaha, baik karena sakit atau cacat.

Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau tidak mengambil bagian Amil dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Semua anggota pengurus telah sepakat untuk menyerahkan bagian Amil kepada *Asnaf* Fakir-Miskin. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, setiap tahun Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan biaya operasional kepada Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

6. Mengelola biaya operasional Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau tahun 2007 sehingga semua tugas dan kegiatan berjalan baik dan lancar. Dana operasional tersebut berjumlah Rp 160.000.000. Semua dana tersebut dikelola sesuai dengan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan

Negara. Penggunaan dana operasional tersebut dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) lengkap dengan kwitansi pengeluaran setiap triwulan/bulan. Dana operasional tersebut dipergunakan antara lain untuk:

- a. Biaya *survey* ke lokasi asnaf yang akan dibantu, agar penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah benar-benar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Pembelian ATK meliputi pembelian/pencetakan kertas surat, amplop, blanko bukti setoran zakat, map termasuk juga pembelian tinta printer komputer, pencetakan Kalendar Badan Amil Zakat Provinsi Riau tahun 2007, pembelian materai, prangko dan sebagainya.
- c. Biaya melaksanakan *study* banding ke Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26-29 Maret 2007 yang diikuti oleh Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Divisi yang ada pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau.
- d. Biaya menghadiri/mengikuti Rapat Koordinasi BAZDA Tingkat Provinsi di Jakarta yang diikuti oleh salah seorang pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau yaitu Drs.H. Bin Fadjri.
- e. Biaya mengikuti Konferensi Zakat Asia Tenggara di Padang pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 Nopember 2007 yang diikuti oleh Sekretaris Badan Amil Zakat Provinsi Riau yaitu Drs.H. Syamsul.

- f. Pembayaran rekening telepon Badan Amil Zakat Provinsi Riau Nomor 27503 dan 848924 (fax dan internet).
 - g. Pembayaran honorarium dan uang transport pegawai Badan Amil Zakat Provinsi Riau.
 - h. Uang transport dan konsumsi rapat pengurus.
 - i. Pembayaran uang langganan Koran Riau Pos.
 - j. Pembayaran uang insentif dalam rangka menghadapi Idul Fitri 1428 H kepada para pegawai Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang besarnya antara Rp 500.000 –Rp 1.800.000.
7. Membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah setiap triwulan/bulan kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau.
 8. Membuat dan mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana operasional kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau setiap bulan.
 9. Meng-up grade data penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah pada website Badan Amil Zakat Provinsi Riau www.BAZriau.or.id agar masyarakat dapat mengakses melalui internet dalam rangka transparansi.⁵

Selanjutnya penulis akan mengemukakan mengenai jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dari tahun 2003-2007, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁵*Ibid.*, h. 4-8.

Tabel II. 1

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Oleh

Badan Amil Zakat Provinsi Riau Tahun 2003-2007

Penerimaan		Penyaluran	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2003	Rp 478.084.023	2003	Rp 240.789.500
2004	Rp 773.809.000	2004	Rp 573.258.000
2005	Rp 828.120.600	2005	Rp 511.055.000
2006	Rp 915.020.000	2006	Rp 561.160.000
2007	Rp 1.178.700.000	2007	Rp 427.448.000

Sumber: Badan Amil Zakat Provinsi Riau, tahun 2009

BAB III

ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG

ZAKAT DAN HUKUM ISLAM

A. Zakat dan Pengelolaannya Menurut Undang-Undang Zakat

1. Pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 5 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.¹

Pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 6 juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan Badan Amil Zakat:

- a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
- b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

¹Tim Redaksi PT Wikrama Waskitha, *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Wikrama Waskitha, 1999, h. 161.

- c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
- d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.²

2. Penggunaannya

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian pada pasal 16 ayat (2) juga diterangkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

B. Zakat Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah.³ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁴ Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

²*Ibid.*, h. 162.

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), Cet. ke-3, h. 156.

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah: Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), Cet. ke-5, h. 34.

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”.⁵ Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu sebagai berikut: Menurut K.H. A. Rauf dan A.S. Rasyid mengemukakan zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk diserahkan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pengertian zakat menurut Sayid Sabiq yaitu:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya: “Zakat adalah nama bagi sesuatu harta yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁶

Dr.K.H. Didin Hafiduddin, M. Sc. menyebutkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

2. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan merupakan *fardhu a'in* atas tiap-tiap orang yang cukup syaratnya. Zakat itu wajib berdasarkan firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW:

⁵*Ibid.*, h. 35.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1978), Cet. ke-3, h. 276.

- a. Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".⁷ (QS. al-Baqarah ayat 43)

- b. Surat an-Nisa' ayat 77

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat".⁸ (QS, An-Nisa' ayat 77).

- c. Surat al-Maidah ayat 12

لِئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

Artinya: "Jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku".⁹ (QS. Al-Maidah ayat 12)

- d. Surat al-Bayyinah ayat 5

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus".¹⁰

⁷Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1983), Cet. ke-8, h. 184.

⁸*Ibid.*, h. 82.

⁹*Ibid.*, h. 100.

¹⁰*Ibid.*, h. 538.

(QS. Al-bayyinah ayat 5)

Berikut ini penulis juga mengemukakan hadits yang menjadi dalil atas diwajibkannya zakat yaitu sebagai berikut: Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub:

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعه للبيع (رواه أبوداود)

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub Ra berkata: Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan”.¹¹ (HR. Abu Daud)

3. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Harta yang wajib dizakatkan menurut ketentuan Islam ada beberapa macam seperti emas dan perak, barang dagangan, binatang ternak, tanam-tanaman, hasil tambang.

Selanjutnya penulis akan menerangkan lebih jelas mengenai masing-masing dari jenis harta yang dizakatkan, serta persentase pengeluaran zakatnya.

a. Emas dan perak

Dalil yang menerangkan tentang wajib zakat emas dan perak adalah firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ast, *Sunan Abu Daud*, Pustaka Nasrun Watuzi’ah, Tth. Juzuk 2, h. 95.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dari rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih".¹² (QS. at-Taubah: 34)

Yang dimaksud ialah emas dan perak, baik yang telah dicetak maupun yang masih batangan yang telah menjadi milik secara hakiki maupun angapan hukum. Maksudnya baik emas maupun perak itu digunakan benar-benar sebagai alat tukar menukar atau fungsinya diganti dengan kertas. Dalam hal ini, surat-surat berharga yang mempunyai jaminan pasti sebagai alat pembayaran, dianggap sebagai emas dan perak.¹³ Nisab emas adalah 20 mitsqal (93,6 gram) sedangkan nisab perak adalah 200 dirham (624 gram). Apabila telah lewat satu tahun maka zakatnya adalah 2,5%.

b. Barang dagangan

Sebagian besar ulama dari sahabat dan tabi'in begitu pun para fuqaha di belakang mereka berpendapat, tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi

¹² Mahmud Junus, *op.cit.*, h. 174.

¹³ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Sya'fi'i Sistimatis*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1987), Cet. ke-2, h. 21.

dari Samurah bin Jundub:

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعه للبيع (رواه أبوداود)

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub Ra berkata: Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan”.¹⁴ (HR. Abu Daud)

Nisab dan zakat barang perniagaan adalah sama seperti nisab dan zakat emas dan perak. Zakat dikeluarkan setahun terhitung sejak dimilikinya uang untuk pembeli barang yang diperdagangkan. Semua laba dari perdagangannya itu, yang tercatat pada akhir tahun wajib dizakati.

Ketentuan zakat perdangan yaitu sebagai berikut:

- 1). Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- 2). Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 93,6 gram.
- 3). Kadar zakat sebesar 2,5%.
- 4). Dapat dibayar dengan uang atau barang.

c. Binatang ternak

Ada beberapa hadits yang sah yang menegaskan diwajibkannya zakat pada unta, sapi, dan kambing, dan ulama sama-sama sependapat-ijma atas keharusan mengamalkannya.

¹⁴Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ast, *loc. cit.*

Dalam wajibnya zakat ternak itu disyaratkan:

- 1). Sampai satu hisab
- 2). Berlangsung selama satu tahun
- 3). Hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu.

Dalam memberikan zakat binatang ternak, dianjurkan untuk memberikan hewan atau binatang yang baik, artinya kondisi binatang tersebut tidak sakit, tidak kurus dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري عن غاضرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم الايمان من عبد الله وحده وأن لا اله الا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطى الهرمة ولا الدرنه ولا المريضة ولا الشرط ولا اللئيمة و لكن من وسط أموالكم فاعن الله لم يسأ لكم خيره ولم يأمركم بشره (رواه أبو داود)

Artinya: "Yahya Bin Jabar dari Jabir Bin Nafir dari Abdullah Bin Mu'awiyah Al-'Ghadhiri dari Ghadhirah berkata: Nabi Saw ada tiga perkata yang bila dilakukan seseorang, berarti ia telah merasai sari keimanan: yaitu bila orang itu menyembah Allah sendirinya dan mengakui bahwa tiada Tuhan hanyalah Dia, dan mengeluarkan zakat hartanya hingga mendorong buat melakukan itu tiap tahun, dan ia tidak memberikan hewan yang tua, tidak pula hewan yang sakit, yang kecil dan yang kurus tidak subur, tetapi dari pertengahan hartanya. Karena Allah tidaklah meminta agar kamu memberikan hartamu yang terbaik tetapi tidak pula menyuruhkan yang terburuk".¹⁵ (HR. Abu Daud)

¹⁵ *Ibid.*, h. 103.

Berikut ini adalah nisab masing-masing binatang ternak:

1). Nisab unta

Adapun nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 1

Zakat untuk unta antara 5 sampai 120 ekor

No	Jumlah Unta	Zakatnya
1	5-9 ekor	1 ekor kambing (berumur 2 tahun lebih)
2	10-14 ekor	2 ekor kambing (berumur 2 tahun lebih)
3	15-19 ekor	3 ekor kambing (berumur 2 tahun lebih)
4	20-24 ekor	4 ekor kambing (berumur 2 tahun lebih)
5	25-35 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
6	36-45 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
7	46-60 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
8	61-75 ekor	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
9	76-90 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
10	91-120 ekor	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

Apabila lebih dari 120 ekor unta, maka menurut fuqaha Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) dan setiap 40 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)¹⁶. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 176.

Tabel III. 2

Zakat untuk unta lebih dari 120 ekor

No	Jumlah Unta	Zakatnya
1	121-129 ekor	3 ekor anak unta usia 2 tahun lebih
2	130-139 ekor	2 ekor anak unta usia 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
3	140-149 ekor	1 ekor anak unta usia 2 tahun lebih dan 2 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
4	150-159 ekor	3 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
5	160-169 ekor	4 ekor anak unta usia 2 tahun lebih
6	170-179 ekor	3 ekor anak unta usia 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
7	180-189 ekor	2 ekor anak unta usia 2 tahun lebih dan 2 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
8	190-199 ekor	1 ekor anak unta usia 2 tahun lebih dan 3 ekor anak unta usia 3 tahun lebih
9	200-209 ekor	4 ekor anak unta usia 3 tahun lebih

2). Nisab sapi

Pendapat masyhur yang diambil mazhab empat ialah bahwa nisabnya sapi adalah 30 ekor¹⁷. Nisab dan zakat untuk sapi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁷ *Ibid.*, h. 177.

Tabel III. 3
Nisab dan zakat untuk sapi

No	Jumlah Sapi	Zakatnya
1	30-39 ekor	1 ekor anak sapi usia 1 tahun lebih
2	40-59 ekor	1 ekor anak sapi usia 2 tahun lebih
3	60-69 ekor	2 ekor anak sapi usia 1 tahun lebih
4	70-79 ekor	1 ekor anak sapi usia 1 tahun lebih dan 1 ekor anak sapi usia 2 tahun lebih

Setelah itu, pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi yang usianya 1 tahun lebih, dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi yang usianya 2 tahun lebih.

3). Kambing

Nisab dan zakatnya untuk kambing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 4
Nisab dan zakat untuk kambing

No	Jumlah Kambing	Zakatnya
1	40-120 ekor	1 ekor kambing usia 2 tahun lebih
2	121-200 ekor	2 ekor kambing usia 2 tahun lebih
3	201-399 ekor	3 ekor kambing usia 2 tahun lebih
4	400-499 ekor	4 ekor kambing usia 2 tahun lebih
5	500-599 ekor	5 ekor kambing usia 2 tahun lebih

Selanjutnya untuk setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing¹⁸.

¹⁸ *Ibid.*, h. 205.

d. Biji makanan dan buah-buahan yang mengenyangkan

Dasarnya adalah firman Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat : 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya :”Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dan jangan kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.¹⁹ (QS. Al-An'am: 141)

Tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah yang menjadi makanan pokok dalam keadaan biasa dan bisa disimpan tanpa mengalami kerusakan, misalnya kurma, anggur, sedangkan dari tanaman adalah gandum, padi, kedelai, jagung dan lain-lain. Adapun yang menjadi makanan hanya disaat paceklik tidaklah perlu dizakatnya.

Nisabnya adalah 800 *mann* (653 kg). Adapun zakat yang harus dikeluarkan setelah mencapai nisabnya ialah 10%, kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakatnya sebesar 5%.

¹⁹Mahmud Junus, *op.cit.*, h. 132.

e. Barang-barang tambang

Yang dimaksud ialah emas dan perak, yang digali dari perut bumi. Apabila digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya. Itulah yang dimaksud barang tambang (*ma'din*). Sedangkan yang asalnya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam itu adalah Rikaz. Adapun yang terbukti dipendam sesudah munculnya agama Islam, maka itu termasuk harta hilang.

و عن بلال بن الحرث رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخذ من المعادن القبلية الصدقة (رواه ابو داود)

Artinya: Dan dari Bilal Bin Harist Ra. bahwasanya Nabi Saw memungut zakat dari pertambangan-pertambangan qabilah”.²⁰ (HR. Abu Daud)

Zakat hasil tambang bila berupa emas dan perak adalah disamakan dengan zakat perdagangan (yakni 2,5% dari jumlahnya) namun tidak perlu ada persyaratan masa satu tahun (haul).

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para (wajib zakat) dan akan dibagikan atau disalurkan kembali. Landasan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

²⁰ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy'ast, *op. cit.*, h. 98.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا
 مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْتَخْطُونَ
 وَلَوْ آتَاهُمْ رِضْوَانًا لَمَا اتَّخَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
 حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (التوبة : ٥٨ - ٦٠)

Artinya: “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka jadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata : Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. (Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya zakat –zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²¹ (QS. at-Taubah: 58-60).

Di bawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

a. Fakir dan Miskin

Seperti sudah disebutkan sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surat at-Taubah yaitu 8 golongan, yaitu yang pertama dan kedua adalah fakir

²¹Mahmud Junus, *op.cit.*, h. 177-178.

dan miskin, mereka itulah yang pertama diberikan saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.²²

Pengertian fakir menurut Mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apaapa di bawah nilai hisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan pengertian miskin menurut Mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Inilah pendapat yang masyhur.

Para ulama Hanafi masih berbeda pendapat mengenai penentuan nisab yang dimaksud, yakni apakah nisab uang tunai sebanyak sebanyak 200 Dirham atau nisab yang sudah dikenal dari harta apapun juga. Jadi golongan Mustahik zakat dalam arti fakir atau miskin menurut mereka adalah:

- 1). Yang tidak mempunyai apa-apa.
- 2). Yang mempunyai rumah, barang, atau perabotan yang tidak berlebihan.
- 3). Yang memiliki mata uang kurang dari nisab.
- 4). Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti 4 ekor unta atau 39 ekor kambing yang nilai tidak sampai 200 dirham.

Fakir dan miskin Imam Mazhab yang tiga

Menurut ketiga, fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya

²²Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 510.

tidak tercukupi. Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya terpenuhi misalnya yang diperlukan 10 tetapi yang ada hanya 7 atau 8.

Sebagian mereka memberikan batasan bahwa orang itu ialah mereka yang dapat memenuhi separoh kebutuhan atau lebih. Adapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separoh kebutuhannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak di atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah satu dari tiga golongan yaitu sebagai berikut:

- 1). Mereka yang tidak punya harta sama sekali
- 2). Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separoh atau kurang dari kebutuhan.
- 3). Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separoh atau lebih kebutuhan untuk diri atau tanggungannya tetapi tidak buat seluruh kebutuhannya.

Menurut Mazhab Maliki dan Hambali, yang dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai bekal cukup setahun. Menurut Syafi'i, harus dapat mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu. Apabila pada umumnya, umur orang di negeri itu 60

tahun, misalnya sekarang ia berumur 30 tahun dan punya bekal hanya untuk 20 tahun, maka ia termasuk mustahik zakat, karena kekurangan bekal selama 10 tahun.

b. Amil Zakat

Amilin atau *amilun* adalah kata jamak dari *mufrad* (kata tunggal) *amil* yaitu mereka (panitia atau organisasi) yang melakukan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahiq) maupun mengelolanya. Organisasi amil zakat mengandung peranan yang sangat penting dalam hal ini. Petugas pemungut zakat harus melakukan tugasnya lebih serius. Tanpa keseriusan kerja para petugas pemungut zakat, niscaya harta zakat yang terhimpun tidak akan maksimal.

c. Orang Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf antara lain ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya nilai jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Golongan muallaf ini terdiri dari orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Oleh sebab itulah barangkali, para ahli Hukum Islam, sebagaimana yang dilaporkan oleh Rasyid Rida membagi muallaf itu menjadi enam macam. Empat macam dari kalangan Muslimin dan dua macam dari kalangan non-Muslim. Yang berasal dari golongan Islam ialah:

- 1). Pemuka-pemuka Muslim yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah kaumnya yang masih kafir. Dengan memberikan bagian muallaf kepada mereka diharapkan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya bersedia masuk Islam. Dan ini dibuktikan dengan tindakan Abu Bakr memberi 'Adi Ibn Hatim dan al-Zibirqan Ibn Badr, karena masing-masing orang itu mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan kaum mereka.
- 2). Pemimpin-pemimpin yang masih lemah iman, yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka tetap dalam Islam dan kuat dalam iman, serta dapat memberikan sumbangan pikiran (nasihat) dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan lain-lainnya.
- 3). Orang-orang Islam yang berada di perbatasan. Mereka diberi dengan harapan agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan musuh.
- 4). Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat. Karana tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib zakat tidak mau memberikan zakat mereka.

Sedangkan orang-orang yang berasal dari non-Muslim ialah:

- 1). Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka. Seperti Safwan Ibn Umaiyah yang diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad Saw pada waktu penaklukan Mekkah dan diberi waktu untuk berfikir selama empat bulan untuk menentukan sikap dan pendiriannya. Sebelum masuk Islam, ia

pernah memperkuat pasukan Islam pada peperangan Hunain dan Nabi Muhammad Saw pernah meminjam senjata kepadanya dalam peperangan tersebut.

- 2). Orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Maka dengan bagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan. Dalam hal ini Ibn 'Abbas melaporkan bahwa ada satu kaum yang datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka, lalu memuji-muji Islam dengan mengatakan: “Ini adalah agama yang baik”. Akan tetapi bila mereka tidak diberi apa-apa, maka mereka akan melakukan penghinaan dan caci-maki terhadap Islam. Diantara mereka itu ialah Sufyan Ibn Harb, 'Uyainah Ibn Hashn dan al-Aqra' Ibn Habis. Orang-orang ini pernah diberi oleh Nabi, masing-masing seratus ekor unta.²³

Nampaknya bagian muallaf, sebagaimana diperinci oleh fuqaha (ahli-ahli Hukum Islam) dan dilaporkan oleh Rasyid Rida dalam tafsirnya itu, diberikan karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah, di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintah sudah semakin mantap, Umar menghentikan pemberian bagian muallaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya.

Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakr, di kala ia masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu pada sejumlah

²³Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*, (Jakarta: Rajawali, 1991), Cet. ke-1, h. 139-140.

orang atas dasar ini. Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi. Pendapat ini pada gilirannya berkembang menjadi pendapat Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam al-Syafi'i. Dikabarkan bahwa 'Uyainah Ibn Hashn dan al-Aqra' Ibn Habis datang kepada Abu Bakr, meminta tanah (bagian mereka). Sebelum permintaan itu dikabulkan, Abu Bakr menyuruh kedua orang itu mengantarkan sepucuk surat kepada Umar Ibn al-Khattab. (Setelah surat itu dibaca oleh Umar), Umar lalu merobeknya, sambil berkata:

هَذَا شَيْءٌ كَانَ يُعْطِيكُمْوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْيِيفًا لَكُمْ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ فَإِنْ ثَبْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْأَقْبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ السَّيْفُ

Artinya: “Ini adalah sesuatu (perkara) yang Rasulullah dahulu memberikannya kepadamu, untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kepadamu) dan jika tidak, maka diantara kami dengan kamu adalah pedang”.²⁴

Setelah mendengar reaksi Umar tersebut, kedua orang itu kembali kepada Abu Bakr dan berkata: “Apakah tuan yang khalifah atau Umar?, Tuan memberikan surat itu kepada kami, lalu Umar merobeknya”. Abu Bakr menjawab: “Memang dia, jika ia menghendaki”.

Akan halnya Abu Bakr, seperti dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dikutipnya dari *Fath al-Qadir*, mengetahui bahwa menurut

²⁴*Ibid.*, h. 141.

pendapat Umar bagian muallaf hanya diadakan ketika Islam masih lemah. Umar berpendapat bahwa hukum untuk memberikan bagian zakat kepada muallaf, disyariatkan lantaran suatu *'illat* (alasan-alasan di balik solusi-solusi dan keputusan tersebut). Oleh karena *'illat* itu telah hilang maka hukum itu tidak dilaksanakan lagi.²⁵

d. Hamba Sahaya

Pengertian hamba sahaya menurut 4 mazhab yaitu sebagai berikut:

1). Mazhab Hanafi

Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain.

2). Mazhab Maliki

Hamba Muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan.

3). Mazhab Hanbali

Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekedar penebus dirinya.

4). Mazhab Syafi'i

Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebus dirinya.

e. Orang Yang Berutang (Gharim)

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan *ghin* panjang)

²⁵*Ibid.*, h. 142.

artinya orang yang mempunyai utang, sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap. Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebut *ghariim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

Menurut Mazhab Hanafiah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.²⁶

f. *Fi Sabilillah*

Menurut Mazhab Hanafi, golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti *sabilillah* saya bermaksud-menurut Abu Yusuf bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena itu yang dipahami dari kemutlakan *lafazh* ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus adalah mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggungan atau yang lainnya.

Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari

²⁶Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 594-595.

jihad. Mazhab Maliki menafsirkan *sabilillah* bahwa maknanya banyak sekali. Akan tetapi tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah tentara yang berperang.

Menurut Mazhab Syafi'i, *sabilillah* itu adalah bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah dan mereka tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan. Mereka berperang bila sehat dan kuat, bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Mazhab Hanbali, pada dasarnya Hanbali sependapat dengan Syafi'i bahwa sabilillah adalah sukarelawan yang berperang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Ulama yang meluruskan arti *sabilillah*, diantara para ulama dahulu maupun sekarang adanya yang meluaskan arti *sabilillah*, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan dari kalimat tersebut.

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musyafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta disuatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikannya ke sana.

5. Manfaat dan Hikmah Zakat

Hikmah zakat sungguh penting dan banyak manfaatnya, baik terhadap sikapnya, lebih-lebih terhadap si miskin ataupun terhadap kepentingan kemasyarakatan. Adapun hikmah dan manfaat dari dikeluarkannya zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- b. Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan *da'i* yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat.
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
- i. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhu'afa* yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- j. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara di sekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- k. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta

(*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

- l. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- m. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah. Dengan begitu, akhirnya tercapai suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan.
- n. Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat *bathin* antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- o. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.²⁷

²⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cet. ke-4, h. 236-237.

C. Efektivitas Pengelolaan Zakat

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Siswanto efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.²⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau *output* yang seharusnya dengan *output* realisasi atau *output* yang sesungguhnya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sejumlah *input* yang dimiliki.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang mencakup kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh seseorang, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Terminologi efektif dalam sebuah organisasi digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh target meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh organisasi, dimana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas pengelolaan zakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran zakat dalam

²⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. ke-2, h. 149.

mengentaskan kemiskinan. Jika pengelolaan zakat tersebut bekerja dengan efektif, maka akan terdapat pengurangan angka kemiskinan.

Pengelolaan zakat secara efektif perlu dilakukan agar proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat optimal. Zakat memiliki berbagai fungsi strategis, selain sebagai wujud ibadah dan kewajiban moral, berfungsi pula sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan. Zakat merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Upaya meningkatkan efektivitas dan kredibilitas zakat semestinya berfokus pada 4 agenda. Pertama, peningkatan penerimaan dana zakat baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kedua, peningkatan efektivitas pendayagunaan dana zakat. Ketiga, perbaikan arah regulasi dan kerangka institusional zakat. Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola zakat.

Diperlukan strategi pendistribusian yang tepat agar dana zakat menjadi efektif. Setidaknya terdapat tiga isu penting di sini. Pertama, prioritas dalam distribusi zakat. Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Isu penting lainnya dalam aspek pendayagunaan zakat adalah masalah identifikasi mustahik agar zakat tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Bicara tentang zakat, yang tidak boleh dilupakan dan merupakan hal yang paling penting adalah peran para amil zakat yang diberi amanah mengelola dana-dana yang terkumpul, baik dari zakat, infaq, shadaqah,

ataupun wakaf. Baik atau tidaknya mustahiq yang lain tergantung pada amilnya. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya) dengan efektif agar fungsi zakat sebagai pengentas kemiskinan dapat dicapai. Baiknya manajemen suatu organisasi zakat harus dapat diukur. Tiga kata kunci untuk mengukur baik atau tidaknya manajemen sebuah organisasi zakat adalah amanah, profesionalitas (pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan efisien), dan transparan (trasparansi dengan para muzakki dan masyarakat luas dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat).

Pembahasan tentang efektivitas organisasi pengelola zakat tidak hanya berbicara tentang bagaimana organisasi zakat bisa mengoptimalkan realisasi dari potensi zakat kaum muslimin yang begitu besar. Di samping mengoptimalkan pemungutan zakat, organisasi zakat juga harus mengelola zakat seefektif mungkin agar jumlah zakat yang dikumpulkan sebanding dengan jumlah zakat yang tersalurkan. Jangan sampai ada penyelewengan dan kesalahan yang menyebabkan jumlah zakat yang akan disalurkan berkurang dari yang seharusnya.

BAB IV
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PROVINSI RIAU OLEH
MUALLAF DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG ZAKAT
DAN HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan BAZ Provinsi Riau Menetapkan Kriteria Muallaf Yang Mendapat Dana BAZ

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Adapun pertimbangan BAZ Provinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapatkan dana zakat yaitu sebagai berikut:

1. Para *muallaf* yang telah memeluk agama Islam paling lama 2 tahun.

Jadi apabila jangka waktunya lebih atau lewat dari 2 tahun, maka *muallaf* tersebut tidak akan menjadi prioritas BAZ Provinsi Riau untuk diberikan bantuan dana zakat.

2. *Muallaf* yang memiliki surat keterangan masuk Islam dari pihak yang berwenang, seperti surat keterangan dari kelurahan setempat.
3. Memiliki Kartu Keluarga atau KK, dan kartu identitas lainnya seperti KTP, serta harus melampirkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.¹

¹Drs.H.Auni M. Noor, M.Si (Ketua BAZ Propinsi Riau), *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2010.

Kalau *muallaf* tersebut tidak dapat melengkapi syarat-syaratnya seperti tidak memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya maka ia hanya diberikan dana konsumtif yang jumlahnya relatif kecil yaitu maksimal sekitar Rp 500.000. Tetapi apabila para *muallaf* dapat melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau maka ia akan memperoleh dana produktif yang besarnya antara Rp 1.000.000-Rp 2.500.000.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan hasil angket yang telah diberikan kepada responden yaitu sebagai berikut:

Para *muallaf* yang mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau berasal dari berbagai daerah, seperti Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara/Nias, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 1
Darimana Asal Daerah Responden

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Riau	1 orang	6,67 %
2	b. Sumatera Barat	2 orang	13,33 %
3	c. Sumatera Utara/Nias	10 orang	66,67 %
4	d. Lain-lain	2 orang	13,33 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa asal daerah responden yaitu sebanyak 1 orang atau 6,67 % dari Riau, 2 orang atau 13,33 % dari Sumatera Barat, 10 orang atau 66,67 % berasal dari Sumatera Utara atau Nias dan

sisanya sebanyak 2 orang atau 13,33 % berasal dari daerah lainnya. Jadi mayoritas responden berasal dari daerah Sumatera Utara atau Nias.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan latar belakang profesi atau pekerjaan dari responden. Karena mereka memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, seperti pedagang, petani, buruh dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 2

Pekerjaan atau Profesi Yang Responden Lakukan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Pedagang	1 orang	6,67 %
2	b. Petani	1 orang	6,67 %
3	c. Buruh	9 orang	60,00 %
4	d. Lain-lain	4 orang	26,66 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 2

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh responden yaitu pedagang sebanyak 1 orang atau 6,67 %, petani sebanyak 1 orang atau 6,67 %, buruh berjumlah 9 orang atau 60,00 %, dan lain-lain sebanyak 4 orang atau 26,66 %.

Para responden ini telah menjalankan pekerjaannya dalam kurun waktu yang berbeda. Ada yang baru saja bekerja dan ada pula yang telah lama bekerja. Berikut ini adalah tabel IV. 3 akan menjelaskan mengenai jangka

waktu responden menjalankan pekerjaannya.

Tabel IV. 3

Sudah Berapa Tahun Responden Menjalankan Pekerjaannya

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. < 1 Tahun	5 orang	33,33 %
2	b. 1-2 Tahun	3 orang	20,00 %
3	c. 3-4 Tahun	6 orang	40,00 %
4	d. \geq 5 Tahun	1 orang	6,67 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 3

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa lama responden menjalankan pekerjaannya yaitu kurang dari 1 tahun sebanyak 5 orang atau 33,33%, antara 1-2 tahun berjumlah 3 orang atau 20,00%, antara 3-4 tahun berjumlah 6 orang atau 40,00%, dan lima tahun atau lebih berjumlah 1 orang atau 6,67%.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan berapa kali responden mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau yaitu sebagai berikut.

Tabel IV. 4
Berapa Kali Responden Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Dari
BAZ Provinsi Riau

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. 1 kali	15 orang	100,00 %
2	b. 2 kali	-	-
3	c. 3 kali	-	-
4	d. ≥ 4 kali	-	-
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 4

Dari tabel di atas diketahui bahwa berapa kali responden mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau adalah 15 orang (100%) atau seluruh responden menyatakan hanya 1 kali mendapatkan bantuan zakat dari BAZ Provinsi Riau.

Jangka waktu para muallaf yang mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau paling lama 2 tahun. Penulis akan mengelompokkan jangka waktu para muallaf tersebut masuk Islam yang terdiri dari kurang dari 6 bulan, antara 6 bulan sampai 11 bulan, 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan dan yang lebih dari 1 tahun 6 bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 5

Lama Responden Menjadi Muallaf

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. 1 tahun	3 orang	20,00 %
2	b. 2 tahun	6 orang	40,00 %
3	c. 3 tahun	4 orang	26,67 %
4	d. ≥ 4 tahun	2 orang	13,33 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 5

Dari tabel di atas diketahui bahwa lama responden menjadi muallaf yaitu satu tahun berjumlah 3 orang atau 20,00%, dua tahun berjumlah 6 orang atau 40,00%, tiga tahun berjumlah 4 orang atau 26,67%, dan empat tahun atau lebih berjumlah 2 orang atau 13,33%.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana pendapat responden untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau yaitu sebagai berikut.

Tabel IV. 6

Bagaimana Menurut Pendapat Responden Untuk Mendapatkan Bantuan Dana
Zakat Dari BAZ Provinsi Riau

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Sangat sulit	1 orang	6,67 %
2	b. Sulit	2 orang	13,33 %
3	c. Mudah	10 orang	66,67 %
4	d. Sangat mudah	2 orang	13,33 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 6

Berdasarkan keterangan tabel di atas diketahui bahwa pendapat responden untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau adalah sangat sulit sebanyak 1 orang atau 6,67%, sulit sebanyak 2 orang atau 13,33%, mudah sebanyak 10 orang atau 66,67%, dan yang menyatakan sangat mudah berjumlah 2 orang atau 13,33%.

B. Penggunaan Dana BAZ Propinsi Riau Oleh Para Muallaf

Perintah zakat bertujuan untuk keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat. Diwajibkannya zakat bukan sekadar ibadah. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan diantara manusia. Distribusi yang terjadi tanpa melalui transaksi-transaksi ekonomi. Zakat bukan pula sekadar *realisasi* kepedulian seorang Muslim terhadap orang miskin. Tapi, lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.

Dana zakat yang diterima oleh muallaf dari BAZ Propinsi Riau digunakan untuk berbagai tujuan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Mereka menggunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli TV, *speaker*, DP honda, dan untuk keperluan lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang *muallaf* yang bernama Ahmad Martius menggunakan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau untuk membeli TV.² Sedangkan *muallaf* yang lainnya menggunakan dana zakat dari BAZ Propinsi Riau tersebut untuk kebutuhan sehari-hari³.

Sementara hanya beberapa orang saja yang menggunakan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau untuk kegiatan yang bersifat produksi. Seperti salah seorang *muallaf* yang bernama Aris Delau yang menggunakan dana zakat

² Ahmad Martius (muallaf yang menerima zakat dari Baz Propinsi Riau), *Wawancara*, tanggal 19 Januari 2009.

³ Ahmad Zeqa (muallaf yang menerima zakat dari Baz Propinsi Riau), *Wawancara*, tanggal 26 Januari 2009.

tersebut untuk usaha berkebun sayur-mayur.⁴ Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan dana zakat oleh *muallaf* atau responden yang diterima dari BAZ Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 7

Kegunaan Dana Zakat Yang Diterima Oleh Responden

Dari BAZ Provinsi Riau

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Kebutuhan konsumtif	8 orang	53,34 %
2	b. Membuka usaha baru	3 orang	20,00 %
3	c. Menambah modal usaha	2 orang	13,33 %
4	d. Lain-lain	2 orang	13,33 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 7

Berdasarkan tabel IV. 7 di atas menunjukkan bahwa kegunaan dana zakat yang diterima oleh responden dari BAZ Provinsi Riau yaitu untuk kebutuhan konsumtif sebanyak 8 orang atau 53,34%, membuka usaha baru sebanyak 3 orang atau 20,00%, menambah modal usaha berjumlah 2 orang atau 13,33%, dan lain-lain sebanyak 2 orang atau 13,33%.

Setiap *muallaf* (responden) mendapatkan jumlah bantuan dana zakat yang berbeda-beda dari BAZ Provinsi Riau. Besar bantuan yang diberikan mulai dari di bawah Rp 1.000.000 sampai di atas Rp 2.000.000. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

⁴ Aris Delau (*muallaf* yang menerima zakat dari Baz Provinsi Riau), *Wawancara*, tanggal 20 Januari 2009.

Tabel IV. 8

Jumlah Dana Zakat Yang Diterima Responden Dari BAZ Provinsi Riau

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. < Rp 1.000.000	1 orang	6,67 %
2	b. Rp 1.000.000- Rp 1.500.000	5 orang	33,33 %
3	c. > Rp 1.500.000- Rp 2.000.000	3 orang	20,00 %
4	d. > Rp 2.000.000	6 orang	40,00 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 8

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang diterima responden dari BAZ Provinsi Riau adalah kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 1 orang atau 6,67%, antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 berjumlah 5 orang atau 33,33%, lebih dari Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 berjumlah 3 orang atau 20,00%, dan lebih dari Rp 2.000.000 berjumlah 6 orang atau 40,00%.

Bantuan zakat dari BAZ Provinsi Riau terhadap muallaf tentu mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraannya. Jika bantuan ini digunakan oleh muallaf kepada kegiatan yang bersifat produktif. Tetapi apabila mereka gunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif maka hasilnya hanya sementara atau cepat habis. Berikut ini adalah tanggapan responden apakah ada peningkatan terhadap usaha mereka setelah diberikan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau.

Tabel IV. 9

Tanggapan Responden Apakah Ada Peningkatan Usaha Setelah Diberikan
Bantuan Zakat Oleh BAZ Provinsi Riau

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Ya	3 orang	20,00 %
2	b. Tidak	11 orang	73,33 %
3	c. Ragu-ragu	1 orang	6,67 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 9

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden apakah ada peningkatan usaha setelah diberikan bantuan zakat oleh BAZ Provinsi Riau adalah sebanyak 3 orang atau 20,00% menyatakan “ya”, sebanyak 11 orang atau 73,33% menyatakan “tidak”, dan sebanyak 1 orang atau 6,67% menyatakan “ragu-ragu”.

Setelah diberikan zakat kepada muallaf maka BAZ Provinsi Riau harus melakukan pengawas terhadap penggunaan dana zakat tersebut oleh muallaf. Hal ini sangatlah penting karena akan dapat melihat pengaruh dari bantuan zakat tersebut. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tanggapan responden apakah BAZ Provinsi Riau pernah melakukan pengawasan setelah diberikannya zakat, yaitu sebagai berikut.

Tabel IV. 10

Tanggapan Responden Apakah BAZ Provinsi Riau Pernah Melakukan Pelatihan
Atau Pengawasan Sebelum Maupun Setelah Diberikannya Dana Zakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	a. Pernah	9 orang	60,00 %
2	b. Tidak pernah	4 orang	26,67 %
3	c. Ragu-ragu	2 orang	13,33 %
Total		15 orang	100 %

Sumber: data olahan angket no. 10

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden apakah BAZ Provinsi Riau pernah melakukan pelatihan atau pengawasan sebelum maupun setelah diberikannya dana zakat adalah sebanyak 9 orang atau 60,00% menyatakan pernah, 4 orang atau 26,67% menyatakan tidak pernah, dan sebanyak 2 orang atau 13,33% menyatakan ragu-ragu.

C. Tinjauan Menurut Undang-Undang Zakat Dan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana BAZ

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung. Tentunya diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan menasihati arti penting zakat bagi keselaran hidup. Dukungan riil pemerintah pun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat.

Secara implisit menyatakan peran substantif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam Bab I pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Begitu juga, dalam Bab III pasal 6 disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Lebih lanjut, peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam Bab III pasal 9 dan Bab VIII pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, *Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.*

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan

pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Muallaf yang mendapatkan bantuan zakat dari BAZ Provinsi Riau mayoritasnya berasal dari Sumatera Utara/Nias. Jadi mereka adalah para pendatang yang telah tinggal di Kota Pekanbaru dan sudah memiliki kartu identitas (KTP) Kota Pekanbaru. Sedangkan profesi atau pekerjaan muallaf tersebut kebanyakan adalah sebagai buruh. Mereka telah menjalankan profesinya tersebut paling lama 5 tahun.

BAZ Provinsi Riau memberikan bantuan dana zakat kepada para muallaf hanya sekali. Hal ini karena masih banyak muallaf lainnya yang belum mendapatkan bantuan zakat. Pihak BAZ Provinsi Riau membatasi syarat muallaf yang akan mendapatkan bantuan dana zakat, yaitu muallaf yang telah memeluk agama Islam paling lama 2 tahun. Jadi bagi muallaf yang telah memeluk agama Islam lebih dari 2 tahun, mereka tidak dikategorikan lagi sebagai muallaf.

Sebagian besar muallaf menyatakan bahwa syarat yang diajukan oleh BAZ Provinsi Riau untuk mendapatkan bantuan dana zakat adalah relatif mudah. Hal ini karena pihak BAZ Provinsi Riau hanya mensyaratkan, yaitu: para muallaf yang telah memeluk agama Islam paling lama 2 tahun, memiliki surat keterangan masuk Islam dari pihak yang berwenang, seperti surat keterangan dari kelurahan setempat, memiliki Kartu Keluarga atau KK, dan kartu identitas lainnya seperti KTP, serta harus melampirkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Dana zakat yang diterima oleh para muallaf dari BAZ Provinsi Riau digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk kebutuhan konsumtif, membuka usaha baru, menambah modal usaha, dan lain-lain. Tetapi mayoritas muallaf menggunakan dana zakat tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Padahal tujuan awalnya penggunaan dana zakat diberikan oleh BAZ Provinsi Riau untuk usaha atau kegiatan yang bersifat produktif. Oleh sebab itu, pihak BAZ Provinsi Riau harus selektif untuk tahap selanjutnya di dalam pemberian dana zakat kepada muallaf. Sehingga penyalahgunaan dari tujuan awal penggunaan bantuan dana zakat kepada kegiatan yang bersifat produktif dapat dicegah dan diminimalkan.

Di dalam penggunaan dana BAZ Provinsi Riau hendaknya para muallaf yang mendapatkan zakat menggunakan dana tersebut sesuai dengan janji atau tujuan awal. Dan jangan sampai keluar dari rencana awal yang telah ditetapkan. Menepati janji adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya".*⁵ (QS. Al-Isra': 34)

⁵ Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1983), Cet. ke-8, h. 258.

Demikianlah perintah Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri.

Jumlah bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf sekitar Rp 2.000.000. Kalau dilihat dari jumlah nominal dana yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf tersebut maka jumlahnya relatif kecil. Karena untuk membuka usaha baru atau menambah modal usaha dari muallaf dibutuhkan jumlah dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, BAZ Provinsi Riau agar bisa meningkatkan lagi jumlah dana yang akan diberikan kepada para muallaf.

Muallaf yang mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau dan menggunakan dana tersebut untuk tujuan usaha (kegiatan yang bersifat produktif) menyatakan bahwa ada peningkatan usaha mereka setelah diberikan bantuan zakat.

Sebelum memberikan bantuan dana zakat kepada para muallaf pihak BAZ Provinsi Riau terlebih dahulu melakukan pelatihan atau *training* kepada muallaf tersebut. Pelatihan yang dilakukan oleh BAZ Provinsi Riau baik sebelum maupun setelah diberikan bantuan dana zakat merupakan tindakan tepat. Tetapi jumlah waktunya dan frekuensi pelatihan tersebut harus ditingkatkan lagi. Sehingga dapat membantu muallaf untuk bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf pada saat ini belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dan tidak efektif, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf belum mampu meningkatkan perekonomian muallaf tersebut.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh muallaf sesudah menerima dana zakat dari BAZ Provinsi Riau masih sama dengan pekerjaan yang dilakukannya sebelum menerima dana zakat. Contoh seorang muallaf sebelum menerima dana zakat dari BAZ Provinsi Riau berprofesi sebagai kuli bangunan dan setelah menerima dana zakat dari BAZ Provinsi Riau juga masih berprofesi sebagai kuli bangunan.
3. Bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZ Provinsi Riau kepada muallaf tidak dapat menambah kesejahteraan muallaf tersebut.

Hal ini disebabkan oleh penggunaan zakat oleh para muallaf yang cenderung bersifat konsumtif sehingga dana zakat tersebut cepat habis dan tujuan zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer atau sementara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan BAZ Propinsi Riau dalam menetapkan kriteria muallaf yang mendapat dana BAZ yaitu cukup selektif. Hal ini dapat diketahui dari persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZ Propinsi Riau, seperti muallaf yang telah memeluk agama Islam paling lama 2 tahun, muallaf harus memiliki surat keterangan masuk Islam dari pihak yang berwenang, seperti surat keterangan dari kelurahan setempat serta harus memiliki Kartu Keluarga dan kartu identitas lainnya.
2. Penggunaan dana BAZ Propinsi Riau oleh para muallaf yaitu untuk kebutuhan konsumtif sebanyak 8 orang atau 53,34%, membuka usaha baru sebanyak 3 orang atau 20,00%, menambah modal usaha berjumlah 2 orang atau 13,33%, dan lain-lain sebanyak 2 orang atau 13,33%. Sehingga penggunaan dana BAZ tersebut dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan para muallaf.
3. Zakat yang diberikan oleh BAZ Propinsi Riau kepada muallaf pada saat ini belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, apalagi mengarahkan pada kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan zakat oleh para muallaf yang cenderung bersifat konsumtif sehingga dana zakat tersebut cepat habis dan tujuan zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya BAZ Propinsi Riau menilai dengan cermat terhadap para muallaf yang akan diberikan zakat, jangan sampai hanya diberikan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif tetapi harus diarahkan untuk tujuan yang bisa produktif.
2. Diharapkan kepada BAZ Propinsi Riau untuk dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang akan diberikan kepada muallaf karena kalau jumlahnya relatif kecil maka hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan tidak bisa digunakan sebagai modal untuk membuat usaha. Di samping itu BAZ Propinsi Riau juga harus meningkatkan pembinaan dan memberikan pelatihan terhadap para muallaf yang menerima zakat tersebut.
3. Diharapkan kepada para muzakki kiranya tunaikanlah zakat pada saatnya dan salurkan pada suatu lembaga yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Djazuli, Dkk. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- . *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2007.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia. 1997.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*. Jakarta: Rajawali Pers. 1991.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. 2002.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah. 1976.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima. 2003.
- . *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Tim Redaksi PT Wikrama Waskitha. *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Wikrama Waskitha. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1978.
- Shiddieqy, Hasbi Ash T.M. *Kuliyah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Sitanggal, Anshory Umar. *Fiqh Syafi'i Sistimatis*. Semarang: CV Asy-Syifa'. 1987.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1989.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar angket atau kuisioner

B. Surat izin riset

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau Tahun 2006-2009	17
--------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau Tahun 2003-2007	23
Tabel III. 1	Zakat untuk unta antara 5 sampai 120 ekor	32
Tabel III. 2	Zakat untuk unta lebih dari 120 ekor	33
Tabel III. 3	Nisab dan zakat untuk sapi	34
Tabel III. 4	Nisab dan zakat untuk kambing	34
Tabel IV. 1	Darimana asal daerah responden	53
Tabel IV. 2	Pekerjaan atau profesi yang responden lakukan	54
Tabel IV. 3	Sudah berapa tahun responden menjalankan pekerjaannya	55
Tabel IV. 4	Berapa kali responden mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau	56
Tabel IV. 5	Lama responden menjadi muallaf	57

Tabel IV. 6	Bagaimana menurut pendapat responden untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau	58
Tabel IV. 7	Kegunaan dana zakat yang diterima oleh responden dari BAZ Provinsi Riau	60
Tabel IV. 8	Jumlah dana zakat yang diterima responden dari BAZ Provinsi Riau	61
Tabel IV. 9	Tanggapan responden apakah ada peningkatan usaha setelah diberikan bantuan zakat oleh BAZ Provinsi Riau	62
Tabel IV. 10	Tanggapan responden apakah BAZ Provinsi Riau pernah melakukan pelatihan atau pengawasan sebelum maupun setelah diberikannya dana zakat	63

DAFTAR ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang: **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BAZ PROVINSI RIAU OLEH MUALLAF DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN HUKUM ISLAM"**.

1. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh data dalam rangka penulisan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan yang lain.
2. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
3. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
4. Jawaban pertanyaan ini dengan membuat tanda silang (X) atau dengan cara melingkari jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar.

Identitas Peneliti:

Nama : SOFROWI ROKAN

Nim : 10321022544

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

B. Daftar Pertanyaan

Identitas Responden:

Nama :

Umur :

Pendidikan:

1. Darimanakah asal daerah anda ?
 - a. Riau
 - b. Sumatera Barat
 - c. Sumatera Utara
 - d. Lain-lain (.....)
2. Apa pekerjaan atau profesi yang anda lakukan ?
 - a. pedagang
 - b. petani
 - c. buruh
 - d. Lain-lain (.....)
3. Sudah berapa tahun anda menjalankan pekerjaan yang sekarang ini ?
 - a. < 1 tahun
 - b. 1-2 tahun
 - c. 3-4 tahun

- d. ≥ 5 tahun
4. Berapa kali anda mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau ?
- a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. ≥ 4 kali
5. Sudah berapa lama anda menjadi muallaf ?
- a. 1 tahun
 - b. 2 tahun
 - c. 3 tahun
 - d. ≥ 4 tahun
6. Bagaimana menurut pendapat anda untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ Provinsi Riau ?
- a. Sangat sulit
 - b. Sulit
 - c. Mudah
 - d. Sangat mudah
7. Untuk apa anda gunakan dana zakat yang diterima dari BAZ Provinsi Riau ?
- a. Kebutuhan konsumtif
 - b. Membuka usaha baru
 - c. Menambah modal usaha
 - d. Lain-lain
8. Berapa jumlah dana zakat yang anda terima dari BAZ Provinsi Riau ?
- a. $< \text{Rp } 1.000.000$
 - b. $\text{Rp } 1.000.000\text{-Rp } 1.500.000$

- c. > Rp 1.500.000-Rp 2.000.000
 - d. > Rp 2.000.000
9. Apakah ada peningkatan usaha anda setelah diberikan bantuan zakat oleh BAZ Provinsi Riau ?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
10. Apakah BAZ Provinsi Riau pernah melakukan pelatihan atau pengawasan sebelum maupun setelah diberikannya dana zakat ?
- a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Ragu-ragu